

DIY Regional Government Policy Innovation to Upgrade Micro, Small, and Medium Enterprises in the Covid 19 Pandemic Era (Sibakul Jogja)

Ariyanti Luhur Tri Setyarini^{1*}, Vicki Dwi Purnomo²

Universitas Widya Mataram YogyaKarta

Corresponding Author: Ariyanti Luhur Tri Setyarini luhursusetya@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: SiBakul, UMKM, Yogyakarta, Innovation, Local Government

Received : 02, October

Revised : 12, November

Accepted: 22, December

©2022 Setyarini, Purnomo:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Covid 19 pandemic, which began to enter Indonesia since March 2020, has had a significant impact on the sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The people's economy experienced a significant decline. MSMEs in the Special Region of Yogyakarta that rely on income from the tourism sector and shopping from nomads or immigrants, especially those who are studying, many then close their businesses due to the lack of transactions. The Government's policy that prohibits interaction to reduce the spread of Covid 19 forces the Regional Government to immediately make policy innovations to save the sustainability of MSMEs. This research identified a breakthrough by the Regional Government, in this case the DIY Cooperative and UKM Service in its efforts to save MSMEs, by launching the SiBakul Jogja Program (Information System for Development of Cooperatives and Business Actors in Jogja). What are the opportunities and obstacles in the future. The author conducted this research to provide input for improving SiBakul Jogja as a mainstay of UMKM in DIY. The author uses the interview method and the Secondary Data Analysis method, namely research from various types of documents such as books, papers, journals, news and so on.

I.

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Diy untuk Menaik kelaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid 19 (Sibakul Jogja)

Ariyanti Luhur Tri Setyarini^{1*}, Vicki Dwi Purnomo²

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Ariyanti Luhur Tri Setyarini luhursusetya@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: SiBakul,
UMKM, Yogyakarta,
Inovasi, Pemerintah
Daerah

Received : 02, Oktober

Revised : 12, November

Accepted: 22, Desember

©2022 Setyarini, Purnomo:

This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pandemi Covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak yang cukup besar bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata dan belanja dari para perantau atau pendatang, terutama yang sedang menempuh studi banyak yang kemudian menutup usahanya karena minimnya transaksi. Kebijakan Pemerintah yang melarang adanya interaksi untuk mengurangi penyebaran Covid 19 memaksa Pemerintah Daerah untuk segera membuat inovasi kebijakan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM. Penelitian ini mengidentifikasi terobosan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam upayanya menyelamatkan UMKM, dengan meluncurkan Program SiBakul Jogja (Sistem Informasi Pengembangan Koperasi dan Pelaku Usaha di Jogja) peluang dan hambatannya ke depan seperti apa. Penulis melakukan penelitian ini untuk memberikan masukan penyempurnaan SiBakul Jogja sebagai andalan UMKM di DIY. Penulis menggunakan metode wawancara dan metode Analisis Data Sekunder, yaitu penelitian dari berbagai jenis dokumen seperti buku, makalah, jurnal, berita dan sebagainya.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia merasakan dampak cukup berat saat pandemi Covid 19 yang dimulai sejak 2019. Pemerintah Daerah DIY menerapkan kebijakan yang ketat dalam membatasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan PPKM Darurat, sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat. PPKM pertama kali diberlakukan pada 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 lalu di tujuh provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Setelah penerapan PPKM pertama tersebut kemudian dilanjutkan dengan PPKM kedua dan seterusnya menyesuaikan dengan kondisi daerah.

PPKM yang paling berdampak terhadap UMKM dan masyarakat kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PPKM Darurat yang berlaku pada 3 Juli - 25 Juli 2021, dimana PPKM ini menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per harinya. Adapun pengetatan yang diberlakukan antara lain pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan harus ditutup; restoran dan rumah makan tidak menerima makan di tempat; kemudian tempat ibadah tidak diizinkan menyelenggarakan ibadah secara berjamaah, dan lain-lain. Di sektor pendidikan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara *daring* (online). Adanya kebijakan pengetatan tersebut tentunya berdampak pada kondisi ekonomi.

Perekonomian DIY sempat mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 2.69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5.53%. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH) menyebabkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Dari sisi *demand* jumlah konsumen menurun drastis, terjadi penurunan permintaan, yang mengakibatkan penurunan penjualan, sehingga menurunkan pendapatan UMKM juga. Dari sisi *supply*, UMKM juga mengurangi produk yang dihasilkan karena sedikitnya permintaan dan modal usaha yang didapat juga semakin kecil. Distribusi barang juga mengalami hambatan. Penurunan *demand and supply* ini lambat laun akan menyebabkan keterpurukan ekonomi.

Dari survei International Labour Organization (ILO), di Indonesia 70% UMKM berhenti produksi akibat dampak Pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena UMKM bergantung pada pergerakan manusia sebagai konsumen. Bahkan berdasarkan data dari *Organization for Economic Co-Operation and*

Development (OECD) menunjukkan bahwa hampir separuh UMKM di Indonesia akan mengalami kebangkrutan pada Desember 2020 (OECD, 2020). Berbagai pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), korporasi, dan sektor keuangan. Ancaman pada rumah tangga berupa gangguan kesehatan karena terinfeksi Covid-19 bahkan ancaman jiwa; Puluhan bahkan ratusan ribu jiwa berpotensi tertular. Selain itu, juga terdapat ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi. Disrupsi ekonomi yang melanda, mengancam terjadinya penambahan jutaan pengangguran dan kemiskinan.

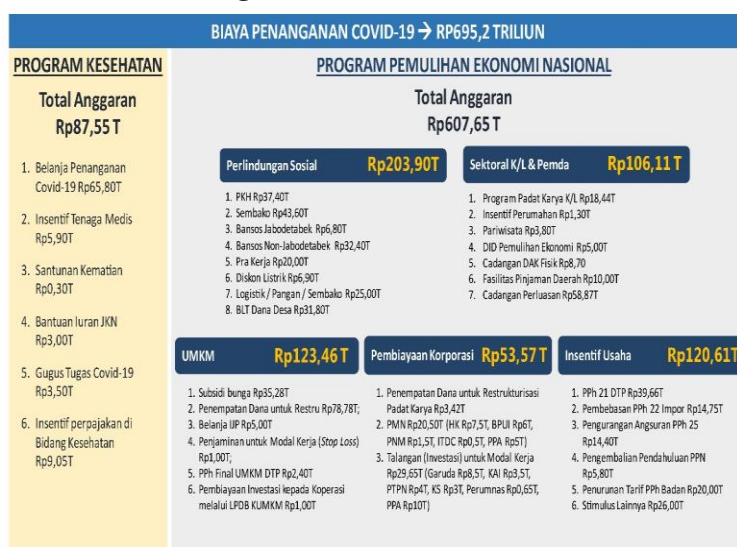
Setelah Covid-19 masuk ke Indonesia dan memberi ancaman pada keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemerintah terus memperkuat kebijakan kesehatan termasuk dengan melakukan *refocusing* serta realokasi anggaran. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada bagi kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Paket Stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Respon kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik yang terancam dari transmisi pelemahan ekonomi Tiongkok dan dunia. Di dalam stimulus tersebut tercakup percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya.

Paket Stimulus II diluncurkan pada 13 Maret 2020. Pada tahap ini, Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dan penyebarannya telah masuk ke Indonesia dengan 69 kasus positif dan 1 kematian. Paket Stimulus II dikeluarkan sebagai respon Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan dunia usaha serta industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Paket Stimulus II terdiri dari stimulus fiskal melalui insentif perpajakan, stimulus moneter, dan kebijakan di sektor keuangan yakni relaksasi kredit bagi UMKM. Paket Stimulus III sebesar Rp405,7 triliun menyusul diluncurkan 31 Maret 2020. Ketiga stimulus yang telah diluncurkan dalam periode Februari – April 2020 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi.

Melalui program PEN yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan

sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Salah satu bagian utama dari program PEN adalah untuk menopang UMKM. UMKM merupakan salah satu fokus utama upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi. Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat signifikan dan telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat. Namun para pelaku UMKM juga memiliki kerentanan yang sangat tinggi di tengah pandemi ini. Total dukungan pada UMKM di dalam program PEN mencapai Rp123,46 triliun, dilakukan lewat berbagai pilar seperti insentif pajak ditanggung Pemerintah atas PPh final UMKM. Selain itu, UMKM juga diberi kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit, melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta kebijakan Pemerintah tersebut sangat membantu agar UMKM bisa survive di kala pandemik. Saatnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih besar pada UMKM sebagai penopang perekonomian nasional dan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Harmawan, SP, MT (21/12/2022) menyampaikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Jogja Economic Resilience for Covid-19 (Jercovid) pada tahun 2020 pernah melakukan survei pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) di DIY terdampak pandemi virus *corona* (Covid-19). Sebanyak 1.000 UMKM yang masuk sebagai koresponden melalui aplikasi 'Sibakul' dan Google Form dari seluruh DIY, sebanyak 321 pelaku usaha perdagangan terdampak paling parah, atau 32,1 persen, disusul industri pengolahan sebanyak 250 pelaku usaha (25 persen). Bidang berikutnya, adalah ekonomi kreatif (21.2 persen). Sedang bidang Usaha lainnya terdata 133 pelaku (13.3 persen) UMKM, atau pelaku usaha yang belum bisa menentukan kategori bidang usahanya atau memang merupakan jenis usaha yang melibatkan lebih dari satu bidang usaha, bidang jasa 46 (4.6 persen). Sedangkan bidang usaha dengan peringkat persentase paling banyak adalah pertanian 16 (1.6 persen), pariwisata 8 (0.8 persen), transportasi 5 (0.5 persen), kelautan dan perikanan 4 (0.4 persen), *real estate* dan properti 3 (0.3 persen), konstruksi 2 (0.2 persen). Sejak pertengahan Maret hingga Juni 2020, pendapatan UMKM turun dari Rp 19,3 miliar menjadi Rp 3 miliar atau turun hingga 80 persen.

Data BPS DIY juga memperlihatkan bahwa semua sektor yang di dalamnya terdapat kegiatan UMKM pada perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan negative selama triwulan I 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi sektor penyangga perekonomian daerah yang paling merasakan sangat terpukul atas dampak dari pandemic covid-19 pada wilayah DIY. Bahkan analisa terhadap survey terhadap UMKM dalam aplikasi Sibakul Dinas Koperasi UKM DIY, menunjukkan lebih dari 55 persen konsumen tidak dapat mengakses produk-produk UMKM, sehingga menurunkan omzet penjualan UMKM. Akibatnya sekitar 44 persen UMKM terpaksa melakukan lay-off atau menekan jumlah tenaga kerja, dengan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja.

Lebih jauh lagi, sebanyak 58 persen UMKM tidak dapat membayar pokok angsuran atau sekedar membayar bunga pinjamannya. Sebagai catatan bahwa kredit UMKM merupakan kelompok debitur utama perbankan DIY, dengan share mencapai 41,4 persen (data Perwakilan BI DIY, 2020). Kondisi itu mengaskan bahwa UMKM menjadi pihak yang terdampak, dengan sebagian besar dari mereka mengharapkan dukungan informasi atau media pemasaran. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya dukungan kebijakan dalam rangka mendukung pembelian produk-produk UMKM.

Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY kemudian berinisiatif untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (SiBakul) yang di launching pada 11 November 2019. SiBakul Jogja merupakan bentuk digitalisasi model Pembinaan Sirkular Dinas Koperasi dan UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah inovasi terus dilakukan melalui SiBakul, seiring mengikuti perkembangan zaman dan adanya pandemi Covid-

19. Di era kekinian pemasaran harus menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat bersosial media. Untuk itu UMKM harus turut menguasai berbagai platform social media seperti facebook, Instagram, tiktok ataupun pemasaran online (Shopee, Lazada, JDID, dan lain lain). Sehingga, semenjak pandemi Covid-19, SiBakul yang kemunculannya diawali dengan pendataan untuk mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun bertransformasi menjadi *markethub*. Kehadiran SiBakul Jogja *Markethub* ini merupakan bagian dari stimulus dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terus memasarkan produknya dengan difasilitasi pemasaran melalui *daring*.

Dengan adanya *markethub SiBakul Jogja*, dibandingkan dengan, jumlah transaksi pada 2021 naik 301%, yaitu dari tahun 2020 jumlah transaksi 14.079 menjadi 56.446 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran SiBakul berperan cukup strategis dalam memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam kurun waktu 2019 - 2022 SiBakul Jogja telah melakukan berbagai upaya adaptif dan berkelanjutan agar UMKM dapat bertahan dan bangkit menghadapi Covid-19, antara lain dengan pendaftaran usaha melalui aplikasi SiBakul Jogja, dari pendaftaran tersebut UMKM yang tergabung dalam SiBakul Markethub dapat memperoleh bantuan-bantuan seperti kurasi produk secara online, fasilitasi sertifikasi PIRT, fasilitasi halal dan ijin edar, subsidi kemudahan pemasaran melalui bantuan ongkos kirim atau free ongkir, serta pemasaran *online*. Langkah-langkah strategis Dinas Koperasi dan UKM di atas tentu saja sangat dibutuhkan oleh UMKM di DIY. Implementasi di lapangan perlu mendapat perhatian agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kehadiran SiBakul Jogja berperan strategis dan menjadi andalan bagi UMKM. Namun tetap saja dalam pelaksanaannya ada hambatan-hambatan yang ditemui,

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terus memasarkan produknya yang mengalami kesulitan mengakses SiBakul Jogja untuk produknya?
2. Bagaimana Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas?

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan masukan penyempurnaan SiBakulJogja yang saat ini menjadi andalan UMKM di DIY, supaya betul-betul dapat menaik kelas UMKM DIY, dengan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SiBakul Jogja, dan

kemudian merumuskan saran strategi yang tepat bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian akan menggunakan teori implementasi yang dikembangkan George C. Edwards III Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu juga sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan perencanaan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan, baik persiapan, perencanaan maupun implementasinya harus disiapkan dengan baik.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 2 sumber data, yaitu wawancara dan Analisis Data Sekunder. Sumber data primer diambil langsung dari subyek penelitian, antara lain informan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan berbagai jenis dokumen resmi milik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bappeda DIY, dan Paniradya Kaistimewan DIY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilik data yang bersumber dari laman resmi Bappeda DIY <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>, jumlah UMKM berdasarkan wilayah yang ada di DIY Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah UMKM berdasarkan wilayah yang ada di DIY Tahun 2021 - 2022

Wilayah	2021	2022*)
Kabupaten Bantul	86.675	86.763
Kabupaten Gunungkidul	53.855	53.925
Kabupaten Kulon Progo	35.916	36.077
Kabupaten Sleman	113.299	113.721
Kota Yogyakarta	32.440	32.629
Lainnya (KTP luar DIY usaha di DIY)	15.280	18.721
	337.465	341.836

*) terakhir update 13 Oktober 2022

Dinas Koperasi dan UKM DIY telah melakukan pemetaan kondisi umum UMKM DIY berdasarkan 6 (enam) aspek yang bisa dipotret melalui jejaring laba-laba, yaitu: 1) aspek produksi; 2) aspek SDM; 3) aspek pemasaran; 4) aspek keuangan; 5) aspek kelembagaan; dan 6) aspek teknologi digital., sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 (pengambilan data dilakukan pada Bulan Juli 2021):



Gambar 2 Skema Jaring Laba-Laba

Hasil dari pemetaan jarring laba-laba tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Pemetaan kondisi umum UMKM

ASPEK PEMETAAN	BAIK	SEDANG	RENDAH	JUMLAH
Produksi	1.139	28.399	270.487	300.025
SDM	3.035	32.415	264.575	300.025
Pemasaran	83.734	128.383	87.908	300.025
Keuangan	3.550	41.019	255.456	300.025
Kelembagaan	1.055	21.094	277.876	300.025
Teknologi Digital	5.886	51.049	243.090	300.025

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di DIY masih lemah pada aspek: produksi, SDM, keuangan, kelembagaan dan teknologi digital. Untuk aspek pemasaran menunjukkan 43% UMKM di DIY sudah dapat memahami pangsa pasar.

Berdasarkan data di atas, maka pengembangan dari SiBakul Jogja terus dilakukan. Program Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (SiBakul) yang *dilaunching* pada 11 November 2019 masih terdapat hal-hal yang membutuhkan optimalisasi dari SiBakul Jogja, antara lain:

1. Akurasi database UMKM belum mampu menjawab secara rigid dan valid atas pertanyaan-pertanyaan terkait UMKM.
Data sebaran UMKM hanya agregat, tidak ada data riil dari sebaran UMKM di DIY. Jumlah agregatnya hanya 275.000 (sumber: Badan Pusat Statistik DIY dalam angka 2019). Data dari Kabupaten/Kota juga sangat bervariasi bentuknya, belum terstruktur sesuai dengan klaster usaha.
Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan bersama UMKM yang terintegrasi. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 2019 Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pembangunan Daerah.



Gambar.3 Perjanjian Kerjasama

2. Skema pembinaan UMKM belum terstruktur, karena belum ada data terupdate terkait dengan pelatihan yang sudah didapat oleh UMKM. Banyak data yang tumpang tindih.
3. Kontraksi ekonomi daerah karena pandemi Covid-19;
4. Tantangan perubahan: *E-commerce* dan transaksi digital;
5. Dibutuhkan fasilitasi bagi UMKM terkait pemasaran yang mudah, cepat dan akuntabel; serta
6. Perlunya revitalisasi sistem bisnis perkoperasian.

Yang dimaksudkan produk-produk UMKM bisa mendapatkan pasarnya dengan konsumen, tanpa mendatangi atau bertransaksi secara konvensional. Pembelian produk UMKM dilakukan secara daring atau on-line dengan tujuan meneguhkan kebijakan social distancing, melalui laman :

1. Web SIBAKUL JOGJA sebagai market hub,
2. Aplikasi playstore JOGJAKARTA atau melalui
3. Whatsapp grup yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Singkatnya, konsumen sama sekali tidak dibebani biaya ongkos kirim terhadap produk yang dibeli dari UMKM.

Langkah ini adalah bentuk keberpihakan terhadap UMKM yang terpuruk selama beberapa bulan terakhir, sekaligus melakukan pembinaan terhadap UMKM. Secara tidak langsung UMKM diberikan bantuan media pemasaran dengan pembebasan ongkos kirim, karena biaya ongkos kirim akan ditanggung pemerintah daerah yang bermitra dengan ojek online. Selain itu, UMKM juga harus melek teknologi, memahami ketersediaan stok, dan setiap saat harus cermat terhadap model aplikasi jual-beli secara daring, serta senantiasa menjaga kualitas produknya (termasuk tatakelola menjaga kualitas produk sesuai protocol kesehatan dalam penanganan dampak covid-19).

Animo masyarakat terhadap langkah UMKM free-ongkir ini cukup antusias, ketika dalam satu bulan pertama ketika kegiatan ini diujicobakan, menunjukkan bahwa ongkos kirim senilai Rp 30 juta mampu memutar bisnis perekonomian masyarakat (konsumen, UMKM, dan ojol) senilai hampir Rp 200 juta. Artinya, UMKM sangat terbantu, dengan stimulus pemasaran selama masa pandemi covid-19 ini. Diharapkan kegiatan UMKM free ongkir ini bisa dilanjutkan sebagai bentuk insentif bagi masyarakat yang menginginkan layanan produk tanpa ribet dan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pasarnya melalui media daring. Media daring adalah jendela bagi ekonomi masa depan yang mau tidak mau harus disadari UMKM apabila mereka mau naik kelas dan berjuang secara tangguh melewati krisis ini. Semoga.

Hambatan Pengembangan Sektor Usaha UKM Yang Terdaftar di Program SiBakul Jogja. Hambatan dalam menghadapi dunia usaha semakin ketat, dengan keterbatasan yang ada pada UKM, maka UKM diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Kecil Mikro diharapkan menjadi salah satu sumber penting untuk meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pelaku UKM dalam mengembangkan sektor usaha yaitu:

1. Modal, modal yang dikeluarkan diawal sangat cukup tinggi karena digunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang menunjang untuk proses pengembangan usaha. Akan tetapi biaya yang digunakan setelahnya relatif lebih rendah.
2. Server Website yang mengalami gangguan seperti susahnya di akses untuk membuka Website tersebut
3. Masyarakat yang kurang pengetahuan tentang digitalisasi, masyarakat akan menghadapi tantangan baru pada era digitalisasi, banyaknya masyarakat yang belum paham untuk menggunakan teknologi seperti Handphone, Sosial Media, dan lainnya, dengan hal itu untuk menghadapi masalah tersebut pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pembinaan dan melakukan kelas bisnis selasa pagi.
4. Kurangnya inovasi dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi, sehingga usaha tersebut hanya bertahan selama 1 tahun, kemudian gagal untuk berwirausaha dan produk yang ditawarkan kalah bersaing.
5. Pengelolaan uang yang kurang efisien, masalah yang hadapi dari hal keuangan karena adanya pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, Dinas Koperasi dan UKM DIY, yaitu: Strategi pengembangan sektor usaha untuk para pelaku UKM sebaiknya kelas bisnis selasa pagi ditambahkan lagi agar para pelaku UKM lebih memahami dan meningkatkan usahanya serta meningkatkan Website MarketHub agar para pelaku UKM tidak merasa kesusahan dalam mengakses situs SiBakul Jogja. 43 2. Untuk mengembangkan UKM yang tidak mengerti dengan digitalisasi sebaiknya mengadakan pendampingan kelas tentang digitalisasi supaya masyarakat lebih mengenal dan memahami bagaimana menggunakan alat teknologi dengan baik dan benar.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bertopik tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Diy untuk Menaik kelaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid 19 (Sibakul Jogja)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data dan info: Kementerian KUKM, BPS, Kementerian Keuangan, OECD 2020 Covid 19 SMES, <https://www.beritasatu.com/news/655435/dampak-covid19-pendapatan-umkm-di-diy-turun-80>